

**ANALISIS PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, OPINI
AUDIT, *FINANCIAL DISTRESS*, UKURAN KANTOR
AKUNTAN PUBLIK TERHADAP *AUDITOR
SWITCHING* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI BURSA EFEK
INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF
ISLAM**

SKRIPSI



OLEH :

**SISTRIA SYAFA'ATUN N
NIM 17403153022**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
JUNI 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang *go public* mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Pihak manajemen perusahaan berkepentingan dalam membuat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini tidak hanya berguna bagi pihak internal perusahaan saja, tetapi juga untuk pihak eksternal perusahaan. Semakin berkembangnya sebuah perusahaan, maka perusahaan akan membutuhkan banyak dana tambahan baik berasal dari penyertaan modal investor, pinjaman dari kreditur, dan lainnya. Laporan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen tidak dengan mudah dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Oleh karena alasan tersebut, perlu adanya pengawasan dari auditor yang berupa pemeriksaan.

Dalam hal ini peran auditor adalah memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Auditor juga harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menghasilkan opini audit yang berkualitas dan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas. Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, laporan keuangan harus diaudit oleh seorang auditor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus objektif dan independen. Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan

kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan.

Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Winarna menyatakan bahwa independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu: (1) *independence in fact*, dan (2) *independence in appearance*. *independence in fact* berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.¹

Independence in appearance berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya, misalnya : Pemberian fasilitas dan bingkisan oleh klien, lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien, hubungan keluarga akuntan dengan klien, hubungan usaha dan keuangan dengan klien. Pada satu sisi muncul berbagai keraguan mengenai independensi tersebut yaitu, apakah hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien kemungkinan

¹Bambang Subroto, Pengungkapan Wajib Perusahaan Publik, (Malang: UB Press, 2014) hal. 23

menciptakan suatu ancaman terhadap hubungan yang terjalin diantara mereka sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi KAP. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi yang dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka.

Masa perikatan audit yang lama menyebabkan perusahaan merasa "nyaman" dengan hubungan yang terjalin selama ini antara auditor (KAP) dengan pihak manajemen perusahaan, yang akan mencapai tahap dimana auditor akan terikat secara emosional dan mengancam independensinya. Giri juga menyatakan hubungan dalam waktu yang lama antara auditor dan klien akan menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hubungan yang semakin dekat dengan manajemen menyebabkan auditor lebih mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik.²

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP secara wajib (*mandatory*) yang dilandasi alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor dan KAP secara wajib

² Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal

diharapkanakan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta.

Adanya pesan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dilatar belakangi oleh runtuhnya KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau *Big 5*. KAP Arthur Anderson terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal ini melahirkan *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002. Kemudian pesan ini digunakan oleh berbagai Negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib. Sampai saat ini banyak badan regulator dari berbagai Negara yang telah menerapkan adanya pergantian KAP secara wajib tersebut.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5

(lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun bukuberturut-turut.³

Peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan adalah, pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3).⁴

Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor atau KAP. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun faktor yang berasal dari auditor. Menurut Febrianto, pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor

³Lindrianasari, “Pergantian CEO Dunia Suatu Bukti Pentingnya Informasi Akuntansi Dalam Isu Pergatian CEO”, (Yogyakarta: Kaisius, 2010) hal 125

⁴Ibid., hal 144

(misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Adanya peraturan mengenai pergantian KAP secara wajib di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan *auditor switching* terutama jika *auditor switching* terjadi diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dan bagaimana pengaruh dari adanya peraturan pergantian KAP secara wajib tersebut. Penelitian mengenai *auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti karena hasil empiris penelitian terdahulu berbeda-beda.

B. Rumusan Masalah

Berbagai penelitian mengenai *auditor switching* telah banyak dilakukan tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menguji kembali faktor faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, ukuran KAP, dengan *auditor switching*. Perumusan masalah yang akan diteliti diantaranya :

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditorswitching*.
2. Untuk Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
3. Untuk Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
4. Untuk Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana analisis pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, ukuran KAP terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan yang terdaftar di BEI serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institusi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

- b. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan.

- c. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan praktik perpindahan KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM.

d. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 variabel, yaitu:

- a) Empat variabel bebas, $X_1 =$ Pergantian Manajemen, $X_2 =$ Opini Audit, $X_3 =$ *Financial Distress*, $X_4 =$ Ukuran Kap.

- b) Satu variabel terikat, $Y =$ *Auditor Switching*

2. Populasi atau subjek penelitian

Populasi atau subjek penelitian dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

F. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian diantaranya adalah:

1. Agar pembahasan skripsi ini jelas dan terarah apa yang hendak dicapai, maka peneliti perlu memahami penelitian yaitu penelitian pada pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress*, Ukuran KAP terhadap *Auditor Switching*.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu didapatkan dari laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Laporan keuangan perusahaan non keuangan yang digunakan terbatas antara tahun 2016 sampai dengan 2016.

G. Penegasan Istilah

Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Analisis Faktor Pergantian Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress*, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Terhadap *Auditor Switching*” adalah sebagai berikut:

1. Pergantian Manajemen (X1)

Pergantian Manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri. Perubahan kebijakan suatu

perubahan mungkin akan terjadi, karena adanya manajemen yang baru.⁵

2. Opini Audit (X2)

Opini selain WTP memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien lebih menginginkan auditor memberi opini WTP atas laporan keuangannya. Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal karena bermanfaat untuk keputusan investasi. Klien yang sudah menerima opini WTP cenderung tidak mengganti auditornya, sampai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah.⁶

3. Kesulitan Keuangan (X3)

Kesulitan Keuangan sebenarnya mempunyai berbagai definisi, tergantung pada cara pengukurannya. Pada saat terjadi masalah keuangan perusahaan, sangat mungkin terjadi konflik kepentingan antara auditor dan pihak manajemen perusahaan, yang mengakibatkan pergantian KAP. Konflik ini terjadi akibat adanya penerapan prinsip konservatisme yang diterapkan auditor.

Potensi kebangkrutan sebagai variabel yang mempengaruhi pergantian auditor. Potensi kebangkrutan merupakan kesulitan solvabilitas yaitu kewajiban keuangan perusahaan sudah melebihi kekayaannya. Apabila prospek perusahaan tidak memberikan harapan

⁵Lindrianasari, "Pergantian CEO Dunia Suatu Bukti Pentingnya Informasi Akuntansi Dalam Isu Pergantian CEO", (Yogyakarta: Kaisius, 2010) hal 189

⁶Abdul Halim, Auditing (Yogyakarta: UPP Akademika Manajemen Perusahaan YKPN,2003) hal 88

likuidasi terpaksa ditempuh. Dalam lingkungan perusahaan yang berpotensi bangkrut, terdapat pengaruh yang besar terhadap putusanya perikatan antara perusahaan klien dengan Kantor Akuntan Publik, seperti adanya permasalahan metode akuntansi, ketidakpuasan atas opini auditor, atau ketidakpuasan terhadap kinerja auditor.

4. Ukuran Kantor Akuntan Publik (X4)

Menurut S.K. Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, kantor akuntan publik adalah lembaga yang memiliki ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya.

5. *Auditor Switching* (Y)

Auditor Switching adalah perpindahan Auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor klien maupun faktor auditor. Dua faktor yang dapat mempengaruhi klien mengganti auditornya, yaitu: faktor auditor karena kualitas dan fee, sedangkan faktor klien karena perubahan *ownership*, kesulitan keuangan, IPO (*Initial Public Offering*), dan manajemen yang gagal.⁷

⁷James J. Stapleton, "Executive's guide to Knowledge Manajemen puncak keunggulan kompetitif" (Jakarta: Erlangga, 2003) hal 88

H. Sistematika Skripsi

Karena begitu banyak dan kompleksnya materi yang disajikan dalam sebuah penelitian, maka sistematika skripsi dapat digunakan untuk mempermudah para pembaca menemukan setiap bagian yang dicari dan dapat dipahami dengan tepat.

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

Bagian Awal yang terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian Utama yang terdiri dari beberapa seperti dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini dijelaskan tentang kerangka teori yang berisi variabel-variabel penelitian yang menjelaskan mengenai konsep dan teori-peraturan

peerintah indonesia mengenai rotasi wajib auditor, Pergantian manajemen, opini audit, *Financial Distress*, Ukuran Kamtor Akutan Publik, *Auditor Switching*, penelitian terdahulu, kerangka konsep yang membahas rumusan masalah serta landasan teori dan ditinjau penelitian terdahulu, kemudian menjelaskan tentang hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber variabel dan skala pengukurannya, serta teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi deskriptif data dan pengujian hipotesis dan kesimpulan penelitian

Bab V Pembahasan

Bab ini membahas tentang bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.